KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Provinsi Riau

Nomor Registrasi: 14-223376-2025

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

GREEN for Riau (Optimalisasi Solusi Iklim Berbasis Hutan untuk Masyarakat dan Alam)

1.2. Dibuat Oleh

iga2020.provinsi.riau (iga2020.provinsi.riau)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

Kepala Daerah

1.5. Nama Inisiator

S.F HARIYANTO

1.6. Jenis Inovasi

Non Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.8. Asta Cita

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

sosial, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Optimalisasi Solusi Iklim Berbasis Hutan untuk Masyarakat dan Alam

1. Dasar Hukum Inovasi

GREEN for Riau Initiative (GREEN-Riau) merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim melalui pengelolaan hutan dan lahan gambut yang melibatkan seluruh pihak secara berkeadilan. Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam pengendalian perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), pembangunan rendah karbon, serta kebijakan **FOLU Net Sink 2030**, yaitu upaya Indonesia untuk menyeimbangkan emisi GRK dengan kemampuan sektor hutan dan penggunaan lahan dalam menyerap karbon.

GREEN-Riau juga dikembangkan dalam kerangka aktivitas **Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)** berbasis yurisdiksi untuk mendukung pengurangan emisi akibat alih fungsi hutan dan penurunan kualitas hutan. Dalam pengembangannya, Provinsi Riau mendapatkan pendampingan teknis dari **UNEP dan FAO dengan dukungan UK-FCDO** untuk memperkuat kesiapan kelembagaan, membangun kerangka kerja REDD+, serta mekanisme pelaksanaan yang terverifikasi, transparan, terukur, dan bertanggung jawab. Inovasi GREEN for Riau berlandaskan pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintahan daerah, pengendalian perubahan iklim, nilai ekonomi karbon, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pada tingkat daerah, inovasi ini secara khusus mengacu pada kebijakan Riau Hijau melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPPLHD Tahun 2024–2053, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta regulasi daerah terkait pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam. Landasan tersebut menjadi pijakan bagi pelaksanaan solusi iklim berbasis hutan yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola untuk meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam.

2. Permasalahan

Provinsi Riau memiliki kawasan hutan, lahan gambut, mangrove, dan keanekaragaman hayati yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung kehidupan masyarakat. Namun, sektor hutan dan lahan gambut juga menjadi salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang tinggi akibat tekanan terhadap hutan, alih fungsi lahan, serta penurunan kualitas ekosistem.

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk memperkuat pengelolaan hutan dan lahan gambut secara terpadu sehingga upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diperlukan tata kelola yang lebih kuat, penyelarasan kebijakan, pelibatan masyarakat, serta mekanisme yang mampu menghubungkan keberhasilan pengurangan emisi dengan peluang memperoleh pembiayaan iklim.

Permasalahan lainnya adalah perlunya memperkuat kesiapan Provinsi Riau dalam mengakses **pendanaan iklim internasional berbasis hasil (Result-Based Payments)** melalui skema REDD+, sehingga upaya pengurangan emisi yang dilakukan di tingkat provinsi dapat diukur, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.

3. Isu Strategis

Isu strategis yang menjadi dasar pengembangan GREEN-Riau adalah perubahan iklim dan kebutuhan pengurangan emisi gas rumah kaca, khususnya dari sektor hutan dan lahan gambut. Dengan luas dan potensi hutan serta lahan gambut yang dimiliki, Provinsi Riau mempunyai posisi strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon dan **FOLU Net Sink 2030**.

Selain isu lingkungan, perubahan iklim juga berkaitan dengan ketahanan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan hutan dan lahan gambut perlu dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat, menjaga ekosistem, memberdayakan masyarakat dan masyarakat adat, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

GREEN-Riau juga menjadi bagian dari upaya memposisikan Provinsi Riau sebagai aktor strategis dalam pengurangan risiko perubahan iklim sekaligus mempersiapkan akses terhadap pembiayaan iklim internasional berbasis hasil melalui mekanisme REDD+.

4. Metode Pembaharuan

GREEN-Riau dikembangkan melalui pendekatan **solusi iklim berbasis hutan dan lahan** yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, penguatan tata kelola, serta mobilisasi investasi dan pembiayaan iklim yang bertanggung jawab.

Metode pembaharuan dilakukan melalui penguatan tata kelola hutan dan lahan gambut, penyelarasan kebijakan, serta pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menempatkan pemerintah sebagai pelaksana, tetapi membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, masyarakat adat, komunitas lokal, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan mitra pembangunan.

Dalam kerangka REDD+ berbasis yurisdiksi, GREEN-Riau diarahkan untuk membangun mekanisme pengurangan emisi pada tingkat provinsi yang dapat diukur dan diverifikasi. Keberhasilan pengurangan emisi tersebut selanjutnya dipersiapkan untuk memperoleh **Result-Based Payments** atau pembiayaan iklim internasional berbasis hasil.

Pengembangan GREEN-Riau juga diperkuat melalui pendampingan teknis **UNEP dan FAO dengan dukungan UK-FCDO**, khususnya dalam memperkuat kesiapan kelembagaan, kerangka kerja REDD+, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan, terukur, terverifikasi, dan bertanggung jawab.

5. Keunggulan dan Kebaharuan

Keunggulan GREEN-Riau terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan **pengurangan emisi, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, penguatan tata kelola, dan pembiayaan iklim** dalam satu inisiatif di tingkat Provinsi Riau.

Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada perlindungan hutan dan lahan gambut, tetapi juga menghubungkan keberhasilan pengurangan emisi dengan peluang memperoleh pembiayaan iklim internasional melalui skema REDD+ berbasis yurisdiksi. Dengan demikian, upaya menjaga hutan dan menurunkan emisi dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus mendukung ketahanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebaruan lainnya adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat dan masyarakat adat, komunitas lokal, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, hingga mitra pembangunan internasional. Pendekatan tersebut memungkinkan perlindungan lingkungan dan kemajuan pembangunan dilakukan secara bersamaan.

6. Tahapan Inovasi/Penggunaan Produk/Spesifikasi Produk

Pelaksanaan GREEN-Riau dilakukan melalui tahapan penguatan kesiapan kelembagaan dan tata kelola, penyelarasan kebijakan, penguatan kerangka kerja REDD+ berbasis yurisdiksi, serta pelibatan aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Tahapan pengembangan diarahkan pada:

1. **Penguatan kelembagaan dan tata kelola**, termasuk peningkatan kesiapan kelembagaan Provinsi Riau dalam pelaksanaan agenda pengurangan emisi dan pengelolaan hutan serta lahan gambut.
2. **Penyelarasan kebijakan**, untuk memastikan kebijakan daerah mendukung pengelolaan hutan, lahan gambut, mangrove, keanekaragaman hayati, dan ekosistem secara berkelanjutan.
3. **Pengembangan kerangka REDD+ berbasis yurisdiksi**, dengan memberikan insentif atas keberhasilan pengurangan emisi pada tingkat Provinsi Riau.
4. **Pelibatan multipihak**, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, masyarakat adat, komunitas lokal, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan mitra pembangunan.
5. **Pendampingan teknis**, melalui dukungan UNEP dan FAO dengan dukungan UK-FCDO dalam memperkuat kesiapan kelembagaan, kerangka kerja REDD+, serta mekanisme pelaksanaan yang terverifikasi, transparan, terukur, dan bertanggung jawab.
6. **Persiapan akses pembiayaan iklim internasional berbasis hasil (Result-Based Payments)** sebagai insentif atas keberhasilan Provinsi Riau dalam menjaga hutan dan

mengurangi emisi.

Melalui GREEN for Riau Initiative, Provinsi Riau diarahkan untuk memperkuat perannya dalam pembangunan rendah karbon dengan menjadikan hutan, lahan gambut, mangrove, keanekaragaman hayati, dan ekosistem yang sehat sebagai fondasi bagi ketahanan iklim, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kesejahteraan antargenerasi. Selain itu, pelaksanaan GREEN-Riau didukung dengan **Keputusan/Surat Keputusan Gubernur Riau nomer KPTS 65/I/2026 tentang pembentukan tim koordinasi pelaksanan inisiatif green for riau.**

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan utama GREEN for Riau adalah menjadikan Provinsi Riau sebagai program REDD+ berbasis yurisdiksi yang diakui, berintegritas tinggi, serta mampu menghasilkan, menerima, dan mengelola pembayaran berbasis hasil secara efektif dari sumber publik maupun swasta. Melalui pengurangan emisi yang terverifikasi, tata kelola yang kredibel, pembagian manfaat yang inklusif, dan pembiayaan yang berkelanjutan, Riau diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ambisi FOLU Net Sink 2030 di tingkat nasional dan provinsi, sekaligus menghadirkan manfaat jangka panjang bagi hutan, lahan gambut, keanekaragaman hayati, masyarakat, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh GREEN for Riau adalah berkontribusi pada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan atas ekosistem penting secara global, sekaligus menghasilkan manfaat non-karbon bagi keanekaragaman hayati, tata air, ketahanan ekosistem gambut, dan mata pencaharian lokal.

1.13. Hasil Inovasi

GREEN for Riau berkontribusi pada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan atas ekosistem penting secara global, sekaligus menghasilkan manfaat non-karbon bagi keanekaragaman hayati, tata air, ketahanan ekosistem gambut, dan mata pencaharian lokal. Inisiatif REDD+ berbasis yurisdiksi yang mendukung aksi iklim, restorasi ekosistem, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan rendah karbon yang inklusif di seluruh Provinsi Riau.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

19-10-2023

1.15. Waktu Implementasi

27-11-2025

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

/storage_bskdn_4/2026/A/provinsi/2026/08/12/provinsi-2026-08-12-iga2020_provinsi_riau-009264c8.pdf

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

0.518266,101.450305

1.21. Kematangan

85.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Inisiatif Green for Riau • Pembentukan Tim Penguatan Pengelolaan Bentang Alam Berbasis Lanskap Dalam Rangka Pengurangan Emisi dan Peningkatan Serapan Karbon di Provinsi Riau
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	Lebih dari 30	• Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Inisiatif Green for Riau
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• Alat Kerja Inovasi Green For Riau
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training /TOT)	• Inovasi Komunitas Hijau dari Lahan Gambut Riau
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program	• RKPD RIAU 2025 • RKPD RIAU 2026

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
		inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Inisiatif Green for Riau
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	• Pedoman Teknis Green For Riau
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Inisiatif Green for Riau.
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• Mekanisme Pengaduan • acuan kelembagaan, operasional, dan safeguarding untuk penerimaan, penanganan, penyelesaian, dan pembelajaran pengaduan • Penyeelsaian layanan pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN FONDASI KEBERSAMAAN UNTUK GREEN FOR RIAU • Rencana Perlibatan Pemangku Kepentingan • Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Inisiatif Green for Riau
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• DOKUMEN PELAYANAN
15.	Layanan Terintegrasi	0	• Layanan integrasi
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	• Panduan Inovasi • Panduan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	• laporan monev

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita (Bukan milik pemerintah daerah)	• Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• Green For Riau
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	• PENERIMA MANFAAT
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	-	Tidak Tersedia